

Bakamla Jemput 18 Nelayan RI yang Sempat Ditangkap di Australia

KUPANG (IM) - Sebanyak 18 nelayan asal Indonesia telah diserahkan oleh Pemerintah Australia lewat Australian Custom Vessel Cape Sorell milik Australian Border Force (ABF) kepada Bakamla RI melalui KN. Pulau Marore-322, di Perairan Asmore Reef (Perbatasan Indonesia-Australia), Senin (13/5).

Awalnya, 36 nelayan Indonesia ditangkap oleh Pemerintah Australia sepanjang tahun 2024. Kemudian nelayan tersebut telah menjalankan proses pemeriksaan, dan diberikan izin kepulangan.

Berdasarkan laporan yang diterima dari Komandan KN. Pulau Marore-322

Letkol Bakamla Adi Poetra Sitanggang, proses pemulangan berlangsung dengan aman dan lancar.

Sebanyak 18 nelayan dibawa melalui KN. Pulau Marore-322 milik Bakamla RI, dan 18 nelayan lainnya dibawa oleh KP Orca 05 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Setelah prosesi serah terima, nelayan tersebut diproses keimigrasian dan kesehatan diatas kapal.

Lebih lanjut, pada hari ini seluruh nelayan yang dibawa oleh KN Marore-322 dan KP Orca 05 akan diserahkan kepada perwakilan Instansi pemerintah daerah Kupang dan Kepala Dinas Kelautan Perikanan Sulawesi Tenggara. ● mei

Pedangdut Nayunda Diperiksa KPK Terkait Dugaan Pencucian Uang Eks Mentan SYL

JAKARTA (IM) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil penyanyi dangdut Nayunda Nabila, untuk diminta keterangannya terkait dugaan pencucian uang mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL), Senin (13/5).

Nayunda diperiksa penyidik KPK sebagai saksi terkait TPPU yang dituduhkan kepada SYL.

"Hari ini (13/5) bertempat di gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, Nayunda Nabila (Swasta / Penyanyi)," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (13/5).

Perlu diketahui bahwa nama Nayunda Nabila sempat disebut dalam persidangan Syahrul Yasin Limpo. Nayunda disebut-sebut pernah menerima aliran uang dari SYL. SYL diduga menggunakan dana Kementan sekira Rp50-100 juta untuk dana hiburan mendatangkan biduan.

Belum diketahui apa yang ingin didalami penyidik dari keterangan Nayunda, hari ini. Kuat dugaan, penyidik ingin mendalami aliran uang dari SYL ke Nayunda.

Selain Nayunda Nabila, penyidik juga memanggil empat saksi lainnya, hari ini. Mereka yakni, Pegawai Suta Travel, Harvey; Pegawai Maktour Travel, A Reknis; serta dua Pemilik Suta Travel, Steven Lawton Lafian dan Ita Tjoanda.

Keempat saksi tersebut juga akan dimintai keterangannya berkaitan dengan dugaan pencucian uang SYL. Namun, pemeriksaan keempatnya bakal dilakukan di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan.

"Kemudian bertempat di BPKP Sulawesi Selatan, juga dijadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi tersebut," jelas Ali. Sebelumnya, KPK menetapkan SYL sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). "Tersangka SYL turut pula disangkakan melanggar Pasal 3 dan atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 13 Oktober 2023 lalu. ● han

Lebih Murah Rp100 Juta, Rubicon Eks Mario Dandy Dilelang Lagi 20 Mei

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) akan kembali melelang barang rampasan mobil Rubicon Wrangler atas nama terpidana Mario Dandy Satriyo. Sebab, Rubicon tersebut belum laku terjual. Kini harga pelelangan turun menjadi Rp 700 juta.

"Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KP-KNL) Jakarta IV akan mengadakan pelelangan atas barang rampasan Negara berdasarkan Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Surat Keputusan Ijin Lelang dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Hari Senin 20 Mei 2024," demikian dikutip dari Instagram Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/5).

Kejari Jaksel menurunkan harga limit Jeep tersebut menjadi Rp 700 juta. Sementara uang jaminan yang disetorkan senilai Rp 210 juta. Pelaksanaan lelang akan dilakukan di situs <https://www.portal.lelang.go.id> dan atau <http://www.lelang.go.id>. Adapun Rubicon tersebut tidak dilengkapi BPKB.

Sebelumnya, mobil mewah Rubicon milik Mario Dandy Satriyo tidak laku terjual dalam pelelangan yang digelar Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel). Jaksel menyatakan Rubicon tersebut akan dilelang ulang dengan harga limit yang diturunkan dari sebelumnya.

"Saat ini belum laku terjual," kata Kepala Kejari Jaksel Haryoko Ari Prabowo saat dihubungi detikcom, Jumat (26/4). Diketahui, sebelumnya Jeep Rubicon milik Mario Dandy dilelang dengan harga pembukaan Rp 809 juta. Namun, karena belum laku terjual, Kejari Jaksel akan melelang lagi dengan nilai limit yang diturunkan atau lebih murah.

"Kemungkinan kita turunkan (harga limit pembukaan)," kata Kepala Kejari Jaksel Haryoko Ari Prabowo saat dihubungi detikcom, Jumat (26/4) lalu. ● han

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat 2 Jo. Pasal 45 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tertanggal 10 Mei 2024, yang telah dinyatakan dalam akta Nomor 22 tertanggal 10 Mei 2024, dibuat dihadapan Esther Pascalia Ery Jovina, SH, MKn, Notaris di Jakarta, para pemegang saham perseroan terbatas PT BINA KARYA PRIMA, berkedudukan di Kota Bekasi (Perseroan) telah memutuskan menurunkan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan dari Rp.3.021.020.000.000,- menjadi Rp.2.021.020.000.000,-

Segala keberatan atas pengurangan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan tersebut dapat diajukan secara tertulis disertai bukti pendukung yang sah, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan beralamat di Jl. Raya Bekasi Km. 27, Pejuang, Medan Satria, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, dengan tembusan kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jl. HR Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan.

Keberatan yang diajukan setelah lewat jangka waktu tersebut tidak akan dilayani lagi.

Jakarta, 14 Mei 2024
Direksi Perseroan

2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



KESIAPAN PENGAMANAN WORLD WATER FORUM KODAM IX/UDAYANA

Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Bambang Trisnohadi (kiri) memeriksa kesiapan prajurit TNI AD saat apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan pengamanan KTT World Water Forum ke-10 di kawasan Renon, Denpasar, Bali, Senin (13/5). Sebanyak 3.047 orang personel gabungan Satgas Pamwil dan Satgas Evakuasi disiagakan oleh jajaran Kodam IX/Udayana untuk melakukan pengamanan rangkaian penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali pada 18-25 Mei.

Draf RUU Penyiaran Menuai Kritikan, Dinilai akan Memberangus Pers

Anggota DPR dari FPKS, Sukamta, mendorong Komisi I DPR agar kembali membahas draf RUU Penyiaran bersama Dewan Pers dan Pemerintah.

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS, Sukamta, menanggapi draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran terbaru yang menuai kritik dari berbagai pihak. Sukamta pun menjelaskan latar belakang pengantar soal larangan penayangan jurnalistik investigasi dalam RUU itu.

"Latar belakang mengapa dalam draf revisi UU penyiaran dicantumkan larangan lembaga penyiaran untuk mencegah terjadinya monopoli penayangan eksklusif jurnalistik investigasi yang hanya dimiliki oleh satu media atau satu kelompok media saja. Padahal setiap media penyiaran memiliki kesempatan untuk menyiarkan suatu konten," kata Sukamta kepada

wartawan, Senin (13/5).

Sukamta berpendapat bahwa tayangan investigasi memang diperlukan untuk masyarakat banyak. Soal penayangan eksklusif, Sukamta mencontohkan acara pesta yang digelar seseorang.

"Tayangan investigasi diperlukan bagi pemirsas untuk mendapatkan informasi yang penting bagi masyarakat banyak. Contohnya tayangan yang membongkar bisnis makanan atau minuman yang ternyata tidak sehat, atau tayangan yang membongkar praktik kejahatan yang banyak terjadi di masyarakat, seperti judi online, sindikat narkoba. Tayangan-tayangan seperti ini justru sangat edukatif dan berguna bagi masyarakat luas," kata Sukamta.

"Tapi, tayangan yang menampilkan secara eksklusif acara pesta seseorang, entah pernikahan atau ulang tahun, secara berkepanjangan, rasanya yang seperti ini tidak perlu, karena tidak edukatif, penayangan mestinya seperlunya saja, karena frekuensi penyiaran adalah hak publik," lanjutnya.

Menurut Sukamta, tayangan jurnalistik investigasi dibutuhkan tetapi dengan batasan.

"Intinya, tayangan jurnalistik investigasi diperlukan, namun ada batasnya, sehingga pelanggaran yang dimaksud dalam draf revisi UU penyiaran itu maksudnya adalah perlu pembatasan," katanya.

Ketentuan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berwenang menyelesaikan sengketa pers. Terkait hal ini, dia menilai mekanisme hak jawab dan hak koreksi yang dilakukan Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa pers masih bermasalah.

"Pada Pasal 8A huruf c RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, disebutkan salah satu kewenangan KPI adalah menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang Penyiaran," kata Sukamta.

"Kewenangan ini dinilai bersinggungan dengan Dewan Pers yang diatur dengan UU Pers yang memiliki mekanisme hak jawab dan hak koreksi. Tapi mekanisme hak jawab dan hak koreksi yang diatur oleh UU Pers menjadi

masalah," sambunginya.

Sukamta pun mendorong Komisi I DPR agar kembali membahas kelanjutan penyusunan draf RUU Penyiaran bersama Dewan Pers dan pemerintah.

"Komisi I DPR RI harus kembali membahas bersama Dewan Pers dan pemerintah untuk mempertegas lex specialis terhadap posisi UU Pers. Idealnya, UU Pers merupakan lex specialis, yaitu UU Pers yang bersifat khusus meniadakan UU bersifat umum," katanya. ● han

37 Orang Tewas Akibat Banjir Lahar Dingin di Sumatera Barat

JAKARTA (IM) - Sebanyak 37 orang meninggal dunia akibat banjir bandang lahar dingin di wilayah Sumatera Barat pada Sabtu (11/5) malam.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyebut, sebanyak 35 jenazah telah berhasil diidentifikasi.

"Hingga Minggu (12/5) pukul 21.00 WIB tercatat total korban meninggal dunia akibat bencana ini mencapai 37 orang. Sebanyak 35 jenazah berhasil diidentifikasi," kata Abdul Muhari dalam keterangannya yang diterima wartawan, Senin (13/5).

Adapun 35 jenazah yang berhasil diidentifikasi tersebut dengan rincian di Kabupaten Agam 19 orang, Kabupaten Tanah Datar sembilan orang, Kabupaten Padang Panjang dua orang, Kabupaten Padang Pariaman tujuh orang.

"Dua jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi. Adapun perubahan jumlah korban disebabkan dinamika laporan dari masyarakat yang kemudian disesuaikan dengan catatan korban ditemukan, dan yang masih dalam pencarian oleh Basarnas dan TNI-POLRI," ujarnya.

Lebih jauh, empat Kabupaten seperti Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Panjang dan kabupaten Padang Pariaman dilaporkan terdampak cukup parah akibat banjir bandang lahar dingin tersebut.

"Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat yang bermukim di sekitar bantaran sungai yang berhulu ke Gunung Marapi agar selalu waspada akan potensi risiko bahaya susulan. Warga diharap melakukan evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman," jelasnya.

17 Orang Hilang

Hingga kini masih ada 17 orang yang dilaporkan hilang. Adapun dari 17 jiwa, 14 orang yang dilaporkan hilang dari Kabupaten Tanah Datar.

"Hingga Minggu (12/5)

malam, jumlah orang yang dilaporkan hilang sebanyak 17 orang. Sebanyak 14 orang hilang dari Kabupaten Tanah Datar dan tiga lainnya dari Kabupaten Agam," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya, Senin (13/5).

Pria yang kerap disapa Aam itu menyebutkan, upaya pencarian dan pertolongan terhadap para korban akan dilanjutkan pada hari ini mengingat, kondisi lokasi pada malam hari kurang penerangan dan adanya peringatan akan peningkatan getaran hujan di wilayah hulu.

Selain itu, Aam juga menjelaskan, sebanyak 37 orang dilaporkan meninggal dunia akibat banjir bandang lahar dingin yang terjadi di wilayah Sumatera Barat.

"Hingga Minggu (12/5) pukul 21.00 WIB tercatat total korban meninggal dunia akibat bencana ini mencapai 37 orang. Sebanyak 35 jenazah berhasil diidentifikasi," ujar dia.

Ia melanjutkan, ada 35 jenazah yang berhasil diidentifikasi tersebut dengan rincian di Kabupaten Agam 19 orang, Kabupaten Tanah Datar sembilan orang, Kabupaten Padang Panjang dua orang, Kabupaten Padang Pariaman tujuh orang.

"Dua jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi. Adapun perubahan jumlah korban disebabkan dinamika laporan dari masyarakat yang kemudian disesuaikan dengan catatan korban ditemukan, dan yang masih dalam pencarian oleh Basarnas dan TNI-POLRI," jelas dia.

Lebih jauh, empat Kabupaten seperti Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Panjang dan kabupaten Padang Pariaman dilaporkan terdampak cukup parah akibat banjir bandang lahar dingin tersebut. ● mei

KPU Bantah Tudingan Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah dalil yang menyebut perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berkurang di wilayah Sumatera Utara (Sumut) karena perolehan suara PPP dipindahkan kepada Partai Garuda.

"Bahwa faktanya, tidak terjadi perpindahan dan pengurangan suara Pemohon ke Partai Garuda, baik di dapil (daerah pemilihan) Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, maupun Sumatera Utara III," ungkap pengacara KPU, Yuni Iswanto, dalam sidang lanjutan sengketa Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (13/5).

KPU menilai dalil PPP sebagai pemohon tidak berdasar dan partai tersebut tidak menjelaskan dengan lengkap pada tahapan mana peminda-

dahan suara itu terjadi. "Proses rekapitulasi penghitungan suara selalu dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat/nasional," sebut Yuni.

Yuni juga menambahkan bahwa saksi mandat dari PPP pun ikut membubuhkan tanda tangan pada penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kabupaten pada tiga dapil yang dipermasalahkan itu. Ia juga menjelaskan, memang ada permintaan dari saksi mandat PPP agar dilakukan penghitungan suara ulang ketika rekapitulasi tingkat provinsi Sumatera Utara, tetapi saksi itu disebut tidak memiliki bukti valid untuk sanding data antara formulir C.Hasil TPS yang ia dapatkan dengan milik KPU.

Menurut Yuni, hal itu yang menjadi sebab KPU Sumatera Utara menolak permintaan yang bersangkutan. Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK Akan tetapi, Ketua Bawaslu Sumatera Utara Aswin Diapari Lubis menegaskan bahwa saksi mandat PPP telah mengisi formulir D.Kejadian Khusus terkait peristiwa saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi itu.

"Keberatan yang pada intinya menolak hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Sumatera Utara pada pemilu yang terindikasi pimpinan sidang arogan," katanya.

Dalam formulir itu, saksi mandat PPP juga disebut menyatakan menolak hasil rekapitulasi di seluruh Kepulauan Nias. ● mei



SIDANG MK PHPU PILEG 2024

Ketua MK Suhartono (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic (kiri) dan Guntur Hamzah (kanan) memimpin jalannya sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung MK, Jakarta, Senin (13/5). Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan dari KPU, Bawaslu, dan pihak terkait.